

V. HASIL-DAN PEMBAHASAN



A. Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah bentang alam luas di permukaan bumi. Ruang terbuka dibagi atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia, Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Sedangkan menurut Direktorat Penata Ruang Nasional, Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditanami tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, cadas, kapur, dan lain-lain).

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 50.685 Km² dengan ruang terbuka hijau sebesar 26,89%. Tahun 2008 sampai tahun 2012 Kabupaten Bantul memiliki total rata-rata luas wilayah yang melakukan konversi lahan sebesar 1,515208 m² dengan rata-rata pertahun 0,303043 Km². Secara garis besar konversi lahan di Kabupaten Bantul dibedakan atas budidaya pertanian dan non pertanian. Pola konversi lahan di kabupaten bantul ditetapkan pada peraturan daerah No 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010 – 2030.

Tabel 8. Data petani atau masyarakat yang mengkonversi lahannya dari tahun 2008-2012 (m²)

NO	Kecamatan	Tahun					Total	Rata-rata/tahun
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	Banguntapan	99003	80521	109218	146811	109107	544660	108932
2	Kasih	68471	30809	52536	95504	72601	319921	63984
3	Sewon	59082	48878	39376	61173	71669	280178	56035
4	Bantul	20336	12654	16039	9387	18092	76508	15301
5	Sedayu	26206	14691	4890	9349	7724	62860	12572
6	Pleret	8694	10403	17221	20215	4871	61404	12280
7	Piyungan	8004	7055	16822	15912	11340	59133	11826
8	Pajangan	4032	5044	16583	22909	6756	55324	11064
9	Kretek	225	1639	4328	1951	4431	12484	2496
10	Jetis	1090	0	3598	2905	4743	12336	2467
11	Imogiri	1994	1556	1124	3768	1848	10290	2058
12	Bambanglipuro	3674	1242	2499	0	0	7425	1485
13	Pandak	2137	300	2094	200	150	4881	976.2
14	Pundong	0	0	860	1503	922	3285	657
15	Srandakan	0	0	2375	0	0	2375	475
16	Sanden	0	0	0	1524	0	1524	304
17	Dlingo	0	300	100	0	230	630	126
	Total	302948	215092	289573	393111	314484	1515208	303043

Sumber: BPN Bantul

Berdasarkan penggunaan lahan di kabupaten Bantul tahun 2008 – 2012 Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan yang tingkat alih fungsi lahannya paling tinggi dengan rata-rata sebesar 0,10893 Km² per tahun. Hal ini disebabkan Kecamatan Banguntapan merupakan wilayah *sub urban* (wilayah perbatasan antara desa dan kota), sehingga menjadi pusat pertumbuhan masyarakat. Perkembangan Kecamatan Banguntapan terus meningkat, ditandai dengan semakin banyaknya pusat pendidikan seperti perguruan tinggi yang dahulunya berpusat di Kota Yogyakarta, selain itu meningkatnya perkembangan ruang usaha,

seperti pembangunan ruko dan perhotelan maupun rumah mewah yang berkembang pesat di Kecamatan Banguntapan.



Gambar 3. Kondisi Konversi Lahan di Kecamatan Banguntapan dan Sedayu

Wilayah dengan tingkat konversi lahan berada dikategori sedang adalah Kecamatan Sedayu. Perkembangan konversi lahannya rata-rata sebesar $0,012572 \text{ Km}^2$ per tahun. Hal ini disebabkan Kecamatan Sedayu merupakan kecamatan pengembangan desa mandiri energi, pengembangan bio arang /bio sampah dan peningkatan kawasan industri yang selalu membutuhkan tempat untuk pembangunan.

Berdasarkan tabel diatas, dari 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bantul Kecamatan Dlingo adalah wilayah konversi lahan yang paling rendah yaitu rata-rata perkembangan sebesar $0,000126 \text{ Km}^2$ per tahun. Hal ini disebabkan Kecamatan Dlingo merupakan kawasan rawan gempa bumi, tanah longsor dan kekeringan. Gempa yang meluluhlantakkan Kecamatan Dlingo pada tahun 2006 menyebabkan struktur tanah berubah dan menyebabkan beralihnya fungsi lahan yang dimiliki masyarakat.



Gambar 4. Kondisi Konversi Lahan di Kecamatan Dlingo

Untuk mendukung program kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka tiga kecamatan telah dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, yaitu Kecamatan Piyungan, Pundong, dan Srandakan. Selain penataan wilayah seperti tersebut di atas, pembangunan di Kabupaten Bantul juga mengacu pada Perda No. 01 tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Bantul yang menunjukkan pemanfaatan ruang wilayah.

Pembagian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Budidaya Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kawasan Lahan Basah Non Irigasi;
 - b. Kawasan Lahan Basah Irigasi;
 - c. Kawasan Pertanian Lahan Kering.
2. Budidaya Non Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kawasan Industri;
 - b. Kawasan Perumahan Baru;
 - c. Kawasan Perkotaan;
 - d. Kawasan Pariwisata.

Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bantul sangat di perlukan, secara garis besar pemanfaatan ruang di Kecamatan Banguntapan, Sedayu dan Dlingo dibagi atas:

1. Banguntapan

- a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta / KPY (Kaw. Strategis Ekonomis)
- b. Perubahan Penggunaan Lahan (Konversi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian)
- c. Permasalahan Perbatasan dan Sanitasi Perkotaan

2. Sedayu

- a. Pengembangan Desa Mandiri Energi
- b. Pengembangan Bio arang / Bio sampah
- c. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Industri

3. Dlingo

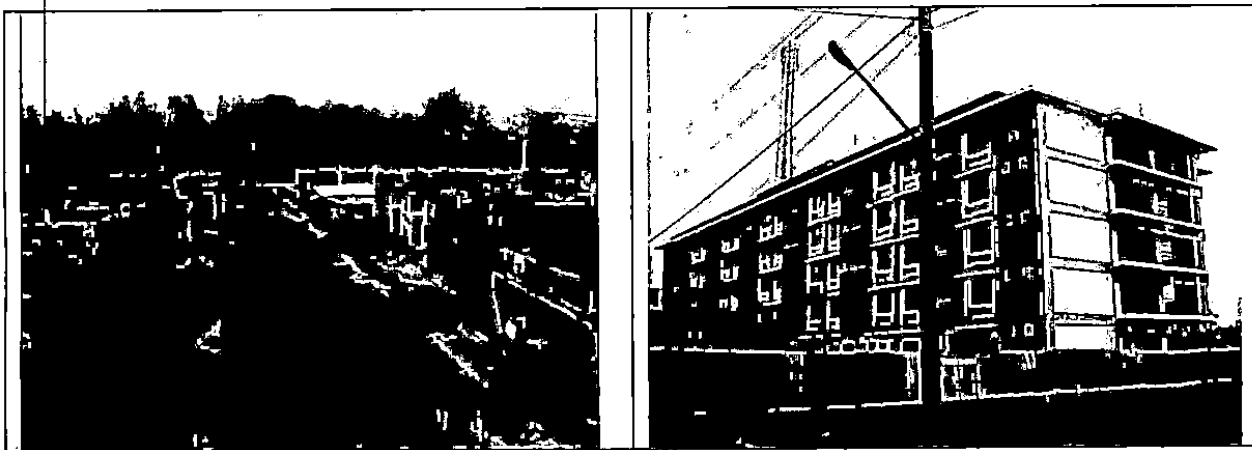
- a. Pengembangan Agrowisata
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan

B. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan mengarahkan kita untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan daya dukung lahan tersebut, dengan demikian lahan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Lahan memiliki anasir: tanah, air, udara, batuan dan organisme, kesemuanya bersifat dinamis karena dapat berubah karakter dan mutunya.

kesesuaian lahan, yakni mencocokkan antara karakter lahan dengan syarat tumbuh tanaman.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 sebagian besar berupa lahan sawah, yakni seluas 15.879,40 Ha, lahan pemukiman 3.927,61, tegalan 6.625,67 Ha, lain-lain 5.694,48 Ha. Penggunaan lahan pemukiman sebagian besar telah menjadi lahan terbangun yaitu berupa bangunan rumah, tempat usaha, industri dan bangunan jasa ekonomi dan sosial lainnya. Perkembangan lahan pemukiman yang terus meningkat mengakibatkan banyak lahan sawah yang menjadi lahan terbangun.



Gambar 5. Kondisi Perkembangan Perumahan di Kecamatan Banguntapan

Berdasarkan Tabel 9, luas lahan pemukiman di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2008 adalah 392,70 Ha sedangkan pada tahun 2012 adalah 456,35 Ha sehingga terjadi peningkatanyaitu seluas63,65 Ha. Luas lahan sawah di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2008 adalah 1.351,57 Ha dan pada tahun 2012 menurun menjadi 51,74 Ha. Penurunan lahan sawah di Kecamatan Banguntapan pertahunnya 17,25 Ha. Penurunan lahan sawah dan peningkatan lahan pemukiman terjadi karena di Kecamatan Banguntapan terdapat fasilitas

pertumbuhan perumahan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Banguntapan termasuk wilayah *sub urban* yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan kota Yogyakarta.

Kecamatan Sedayu merupakan daerah yang mengalami perkembangan perubahan lahan yang sedang. Berdasarkan Tabel 8, pada tahun 2008 – 2012 luas perubahan lahan pemukiman bertambah 4,97 Ha, yaitu dari 270,44 Ha menjadi 275,41 Ha. Dengan begitu luas lahan pertanian terjadi penurunan 5,54 Ha, yaitu dari 984,26 Ha menjadi 978,72 Ha. Hal ini disebabkan kecamatan Sedayu sebagai wilayah pengembangan dan peningkatan kawasan industri yang membutuhkan lahan untuk dijadikan tempat usaha serta didukung dengan jalan Wates yang menjadi akses keluar masuk ke Kota Yogyakarta.

Kondisi masyarakatnya yang rata-rata menengah ke bawah dengan didukung perusahaan-perusahaan properti yang sekarang telah merambah ke pelosok pedesaan untuk mencari tempat-tempat yang alami jauh dari perkotaan dan tentunya dengan harga yang lebih murah, menjadikan masyarakat setempat banyak mengkonversi lahannya menjadi permukiman. Tanah-tanah pedesaan atau pinggiran kota juga menjadi sasaran utama dari para pengembang untuk mendirikan bisnis properti yang sangat menguntungkan.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan konversi lahan di suatu wilayah, maka orang-orang akan berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada, salah satunya dengan mengkonversi lahan sawah mereka menjadi tempat usaha dan

daerah maka lahan-lahan pertanian yang berada di Kecamatan Banguntapan dan Sedayu akan semakin menurun.

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Dlingo terbilang rendah dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul. Berdasarkan Tabel 9, pada tahun 2008 – 2012 luas perubahan lahan pemukiman bertambah 0,05 Ha, yaitu dari 121,52 Ha menjadi 121,57 Ha. Berdasarkan lahan sawah tidak mengalami perubahan, yaitu dari tahun 2008-2012 tetap berjumlah 261 Ha. Namun pada lahan tegalan terjadi penurunan sebesar 0,04 Ha yaitu dari 1.705,46 menjadi 1.705,39, sehingga lahan tegalan setiap tahunnya mengalami penurunan 0,02 Ha. Hal ini dapat terjadi karena Kecamatan Dlingo merupakan daerah agrowisata dan rawan bencana longsor maupun gempa bumi, sehingga menjadikan Kecamatan Dlingo sebagai wilayah yang di jaga akan kealamianya, agar dapat mencegah terjadinya bencana alam yang di sebabkan dari aktifitas alih fungsi lahan.

Tabel 9. Penggunaan Lahan Kecamatan Banguntapan, Sedayu, Dlingo Tahun 2008, 2010, 2012.

No	Kecamatan	Tahun	Penggunaan lahan (Ha)				Jumlah
			Pemukiman	Sawah	Tegalan	Lain-lain	
1	Banguntapan	2008	392,70	1.351,57	6,56	221,06	2.629
		2010	422,56	1.343,06	7,68	196,99	2.629
		2011	436,35	1.319,82	7,67	210,12	2.629
		2012	456,35	1.299,83	7,68	210,13	2.629
2	Sedayu	2008	270,44	984,26	1.841,61	242,49	3.411
		2010	273,26	981,91	1.841,04	242,59	3.441
		2011	273,46	980,66	1.840,48	244,18	3.441
		2012	275,41	978,72	1.840,49	244,18	3.411
3	Dlingo	2008	121,52	261,00	1.705,46	888,03	5.634
		2010	121,55	261,00	1.705,42	888,04	5.634
		2011	121,56	261,00	1.705,41	888,03	5.634
		2012	121,57	261,00	1.705,39	888,04	5.634

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Angka 2008, 2010, 2012.

C. Kondisi Sosial Masyarakat

1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di suatu wilayah sangat mempengaruhi tingkat konversi lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk maka kebutuhan lahan yang akan dijadikan tempat tinggal juga akan meningkat. Berdasarkan Tabel 10 kepadatan penduduk di kecamatan Banguntapan dalam lima tahun terakhir (2008-2012) mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk ini diprediksi akan terus meningkat jika dilihat dari perkembangan wilayah Banguntapan yang dipengaruhi oleh perkembangan Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk Kecamatan Banguntapan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun 7.067 jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Banguntapan mengakibatkan kepadatan penduduk per km² terus mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah peningkatan kepadatan penduduk pertahunnya 248 jiwa/km². Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan Banguntapan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi serta banyaknya fasilitas umum yang semakin pesat. Hal ini juga di dukung dengan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga banyaknya pembangunan perumahan-perumahan baru di Kecamatan Banguntapan. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya lahan kosong di daerah Kota Yogyakarta yang dijadikan sebagai tempat bisnis dan kantor sehingga harus beralih pada daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Berbeda dengan Kecamatan Sedayu dan Dlingo, pada dua kecamatan ini terjadi naik turun jumlah penduduknya dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Dlingo tidak mengalami kenaikan jumlah penduduk yang signifikan artinya terjadi penurunan jumlah penduduk (2008-2012), yaitu dengan rata-rata turun 1.048 jiwa di Kecamatan Sedayu dan 1.464 jiwa di Kecamatan Dlingo. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tingkat kepadatan penduduk dari hasil data tahun 2008-2012, yang menunjukkan Kecamatan Sedayu kepadatan penduduknya menurun, yaitu dari 1.449 jiwa/Km² menjadi 1.313 jiwa/Km², dengan demikian jumlah rata-rata kepadatan penduduk turun 205 jiwa/Km² per tahunnya. Kemudian Kecamatan Dlingo kepadatan penduduknya menurun yaitu dari 746 jiwa/Km² menjadi 641 jiwa/Km², dengan demikian jumlah rata-rata kepadatan penduduk turun 105 jiwa/Km² per tahunnya.

Dari informasi diatas jumlah penduduk di Kecamatan Sedayu tahun 2008-2012 mengalami naik turun. Naiknya jumlah penduduk disebabkan karena adanya tempat pendidikan perguruan tinggi di Kecamatan Sedayu sehingga mahasiswa dari luar pulau banyak berdatangan untuk menempuh pendidikan disamping itu juga didukung jalan Wates yang berada di Kecamatan Sedayu sebagai jalan lintas keluar masuk Kota Yogyakarta sehingga keramaian orang yang datang bahkan bertempat tinggal di wilayah tersebut terus terjadi. Namun pada tahun 2008-2009 terjadi penurunan yang disebabkan adanya peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Sedayu tahun anggaran 2008. Peraturan ini menekan laju pertumbuhan penduduk serta memberikan arahan pengendalian

dukung lingkungan. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk akan membawa konsekuensi pada penyediaan ruang serta kebutuhan hidup. Begitu pula jumlah penduduk di Kecamatan Dlingo dari tahun 2008-2012 mengalami naik turun. Penurunan ini dapat disebabkan karena aktifitas masyarakat setempat dan pendatang yang keluar masuk Kecamatan Dlingo yang kurang terkontrol dengan baik. Sedangkan pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan yang signifikan, terkait dengan diadakan program KB yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk serta adanya peraturan daerah Kabupaten Bantul No 4 tahun 2011 tentang RTRW tahun 2010-2030 untuk menjaga kelestarian agrowisata di Kecamatan Dlingo sehingga dibutuhkan penanganan laju pertumbuhan penduduk

Tabel 10. Kepadatan Penduduk Kecamatan Banguntapan, Sedayu, dlingo Tahun 2008-2012.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk(jiwa)					Rata-rata peningkatan penduduk/tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)					Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk /tahun
			2008	2009	2010	2011	2012		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Banguntapan	28,48	96.528	101.683	120.123	122.510	124.838	7,067	3.389	3.570	4.218	4.302	4.353	248
2.	Sedayu	33,36	50.006	46.347	44.418	44.798	45.116	-1,048	1.449	1.389	1.293	1.304	1.313	-205
3.	Dlingo	55,87	41.674	42.254	35.542	35.667	35.817	-1.464	746	756	636	638	641	-105

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2008-2012.

2. Migrasi Penduduk

Jumlah penduduk di suatu wilayah juga ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk yang bermigrasi, migrasi penduduk juga menentukan besarnya konversi lahan yang terjadi. Apabila penduduk yang datang lebih banyak dari penduduk yang pergi mengakibatkan kepadatan penduduk juga meningkat. Kecamatan Banguntapan, rata-rata penduduk meningkat pada lima tahun terakhir (2008-2012) sebesar 248 jiwa/km², dibanding dengan Kecamatan Dlingo dan Sedayu rata-rata kepadatan penduduk menurun sebesar 205 jiwa/km² dan 105 jiwa/km².

Peningkatan Kepadatan penduduk di Kecamatan Banguntapan lebih disebabkan karena kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Perkembangan Kota Yogyakarta dapat mempengaruhi Kecamatan Banguntapan sehingga dengan luas lahan yang besar dan masih banyaknya lahan yang kosong dapat digunakan sebagai referensi untuk mendirikan pemukiman baru dan tempat usaha.

Semakin banyaknya penduduk yang berpindah dari kota ke desa dan dari luar daerah yang masuk ke dalam wilayah tersebut memberikan pengaruh terhadap penyempitan lahan kosong di Kecamatan Banguntapan. Sehingga Kecamatan Banguntapan dengan luas lahan yang besar dan masih banyaknya lahan pertanian dapat digunakan sebagai referensi untuk mendirikan pemukiman baru. Banyaknya perumahan-perumahan bagi warga kota yang tergusur oleh adanya pembangunan ruko-ruko ataupun hotel-hotel untuk tempat persinggahan dalam Kota Yogyakarta membuat Kecamatan Banguntapan sebagai peralihan untuk dibangun tempat tinggal dan tempat usaha yang baru.

Berbeda dengan daerah Kecamatan Dlingo dan Sedayu, terjadi penurunan kepadatan penduduk pada lima tahun terakhir (2008-2012). Penurunan kepadatan penduduk pada dua kecamatan tersebut dikarenakan banyaknya lahan-lahan pertanian yang tidak dipakai semestinya dan tingginya biaya operasional untuk mengolah lahan tersebut. Rata-rata mereka mempunyai pendapatan yang sedikit dan biasanya hanya bekerja serabutan. Rata-rata penduduk beralih bekerja di kota dengan modal seadanya dan semampunya sehingga banyak dari mereka meninggalkan desa untuk dapat menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga di desa.

3. Pekerjaan penduduk

Pekerjaan penduduk di suatu wilayah mempengaruhi tingkat konversi lahan yang terjadi di wilayah, semakin kecil jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian maka tingkat peralihan lahan ke non pertanian akan semakin besar, hal ini dapat dibuktikan pada tabel 11 pekerjaan penduduk pada sektor pertanian Kecamatan Dlingo lima tahun terakhir (2008-2012) mengalami penurunan, sedangkan pada sektor pekerjaan non pertanian mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada pekerjaan industri pengolahan, yaitu rata-rata peningkatan per tahun sebesar 305 jiwa. Peralihan pekerjaan penduduk dari pertanian menjadi penduduk non pertanian ini diprediksi akan terus meningkat jika dilihat dari perkembangan Wilayah Dlingo yang dipengaruhi oleh industri pengolah kayu yang terus berkembang, sedangkan pekerjaan non pertanian di Kecamatan Dlingo mengalami penurunan dengan rata-rata per tahun

penurunan pekerjaan penduduk pada sektor pertaniannya, yaitu dari 11.821 jiwa menjadi 11.694 jiwa. Di sisi lain terjadi peningkatan pada pekerjaan non pertanian dengan peningkatan tertinggi pada pekerjaan bangunan dengan rata-rata 232 jiwa per tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya pembangunan di wilayah Sedayu seperti pembangunan industri dan rumah sewa yang berakibat terjadinya peningkatan lahan non pertanian.

Tabel 11. Penduduk bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012

No	Kecamatan	Tahun	Jenis Pekerjaan (Jiwa)			
			Pertanian	Industri Pengolahan	Bangunan	Perdagangan, Hotel, & Restoran
1	Banguntapan	2008				
		2010	13.213	8.201	4.711	7.258
		2011	13.695	10.607	4.978	7.331
		2012				
		Rata-rata	241	1.203	134	37
2	Sedayu	2008				
		2010	11.821	1.107	2.240	4.448
		2011	11.694	1.120	2.703	4.865
		2012				
		Rata-rata	-64	7	232	209
3	Dlingo	2008				
		2010	12.536	2.310	1.050	996
		2011	12.144	2.920	1.469	1.333
		2012				
		Rata-rata	-196	305	210	169

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berbeda halnya dengan daerah Banguntapan, dimana pekerjaan penduduk lima tahun terakhir (2008-2012) pekerjaan pertanian penduduk cenderung meningkat (stabil), yaitu dari 13.213 jiwa menjadi 13.695 jiwa. Sedangkan pada sektor pekerjaan non pertanian juga mengalami peningkatan,

jiwa per tahun, perdagangan hotel dan restoran 37 jiwa pertahun. Peningkatan pada semua bidang ini terjadi karena adanya peraturan RTRW pemerintah daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah, dimana wilayah yang maju yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta tetap menjaga kestabilan lahan pertaniannya. Banguntapan adalah wilayah maju dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengolahan lahan pertanian di Banguntapan harus dapat dikendalikan, ini dapat dibuktikan oleh Kecamatan Banguntapan yang dapat memajukan wilayahnya dengan tetap menjaga keseimbangan lahan pertanian dan non pertanian.

D. Persepsi Masyarakat

Persepsi atau cara pandang beberapa individu yang dianggap dapat mewakili masyarakat lainnya dalam aktifitas di suatu wilayah yang sama. Cara pandang masyarakat dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan pertanian di kabupaten Bantul khususnya pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Banguntapan, Sedayu dan Dlingo yang dianggap mewakili kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden, yaitu masyarakat yang pernah melakukan

Tabel 12. Persepsi Masyarakat yang Melakukan Konversi Lahan

No	Pertanyaan	Jawaban	Kab. Bantul	%
1	Apakah anda mengetahui tentang alih fungsi lahan sawah?	a. Ya b. Tidak	60 -	100,00 -
2	Apakah pernah melakukan alih fungsi lahan sawah?	a. Ya b. Tidak	60 -	100,00 -
3	Tahun berapa anda melakukan alih fungsi lahan sawah?	a. 2008-2010 b. 2011-2012	25 35	41,70 58,30
4	Apakah anda mengurus izin perubahan penggunaan tanah (IPPT)?	a. Ya b. Tidak	58 2	96,66 3,33
5	Apakah perizinan untuk pengubahan fungsi lahan dari pemerintah daerah kabupaten Bantul didapatkan dengan mudah?	a. Ya b. Tidak	50 10	83,40 16,60
6	Bagaimana prosedur yang dilakukan pada saat akan mengubah lahan?	a. Langsung mengubah lahan baru mengurus perizinan b. Mengurus perizinan terlebih dahulu, baru mengubah lahan	9 51	15,00 85,00
7	Setelah mendapatkan izin untuk pengubahan fungsi lahan, apakah anda langsung mengubah fungsi lahan tersebut?	a. Ya b. Tidak	54 6	90,00 10,00
8	Apakah penyebab utama melakukan alih fungsi lahan sawah?	a. kebutuhan ekonomi b. lahan berada di daerah strategis c. kebutuhan tempat tinggal	1 15 44	1,66 25,00 73,33
9	Berapa luas lahan yang dikonversi?	a. <500 m ² b. 500-1000 m ² c. >1000 m ²	10 44 6	16,66 73,33 10,00
10	Digunakan untuk apa lahan sawah yang dialihfungsikan tersebut?	a. tempat tinggal b. wirausaha	51 9	85,00 15,00
11	Apakah anda mengetahui dampak yang terjadi akibat konversi lahan sawah?	a. Ya b. Tidak	53 7	88,33 11,66
12	Apabila "Ya", apakah dampak alih fungsi lahan sawah?	a. menurunnya produksi pertanian b. meningkatnya pencemaran lingkungan c. menurunnya penyerapan air	43 1 9	81,13 1,88 16,99

Sumber : Data primer kuesioner

Berdasarkan hasil analisis kuesioner responden yang melakukan konversi lahan menunjukkan bahwa 100% responden telah mengetahui tentang konversi lahan. Pengetahuan tersebut diperoleh responden karena telah melakukan konversi lahan. Hasil observasi yang telah dilakukan, lahan yang dikonversi sebagian besar berada di pinggir jalan. Berdasarkan waktu melakukan konversi lahan, sebanyak 41,7% responden melakukan konversi antara tahun 2008-2010 dan 58,3% responden melakukan konversi antara tahun 2011-2012. Hasil wawancara secara langsung di lapangan, ada beberapa alasan terjadinya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Hasil kuisisioner tentang perizinan alih fungsi lahan, tidak semua responden mengurus Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 23 tahun 2000. Dapat dilihat bahwa ada 3,33% responden di Kecamatan Delingo tidak melakukan perizinan dalam mengkonversi lahannya pada saat wawancara responden menyatakan karena sulitnya untuk mengurus perizinan dan lokasi untuk melakukan perizinan terlalu jauh. Sedangkan 96,66% responden telah melakukan perizinan sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 23 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah.

Pada saat mengubah lahannya, 85% responden menyatakan mengurus perizinan terlebih dahulu dan setelah itu mengubah lahannya, dan 15% responden mengubah lahan terlebih dahulu kemudian mengurus izin. Responden yang langsung mengubah lahannya adalah responden dari Kecamatan Banguntapan dan

mereka langsung mengubah lahannya. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi tingginya tingkat konversi lahan di Kabupaten Bantul yaitu banyak lahan-lahan pertanian yang diubah fungsinya menjadi lahan terbangun tanpa izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah, hal ini menjadi permasalahan yang serius apabila alih fungsi lahan berpotensi melanggar jalur yang ditetapkan oleh perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul yang mengakibatkan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terus meningkat dan meluas. Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri telah melakukan tindakan berupa teguran dan surat peringatan kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin dan apabila tidak segera menyelesaikan perizinan maka bisa terkena sanksi berupa kurungan maksimal tiga tahun atau denda administrasi antara Rp100 hingga Rp500 juta sesuai perda Kabupaten Bantul No. 23 Tahun 2000 pasal 63 tentang Ketentuan Pidana.

Setelah mendapat izin pengubahan fungsi lahan 90% masyarakat langsung melakukan konversi lahan, dengan alasan sebagai kebutuhan tempat tinggal dan usaha. Sedangkan masyarakat yang tidak langsung mengubah lahannya sebanyak 10% alasan masyarakat tidak langsung mengubah lahannya karena keterbatasan biaya. Berdasarkan penyebab utama responden melakukan konversi lahan, sebanyak 73,33% menyatakan kebutuhan akan tempat tinggal sebagai penyebab utama melakukan konversi lahan.

Sebanyak 25% responden, mengungkapkan keberadaan lahan di tempat yang strategis adalah penyebab utama melakukan konversi lahan, lahan strategis ini biasanya berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah

perkotaan. Keberadaan lahan yang strategis banyak dimanfaatkan untuk berwirausaha dan juga membangun toko-toko yang kemudian dapat disewakan atau dijual, sedangkan 1,66% masyarakat merubah lahannya karena kebutuhan ekonomi yang terus meningkat sedangkan hasil dari lahan sawahnya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya sehingga masyarakat, merubah lahannya menjadi tempat tinggal yang akan disewakan, hal ini berkaitan dengan perkembangan aglomerasi kota Yogyakarta.

Perkembangan fisik Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) merupakan salah satu faktor penyumbang terjadinya alih fungsi lahan, hal ini berkaitan dengan populasi penduduk yang telah mendekati angka 1.000.000 jiwa. Selain itu, mobilitas manusia serta aktivitas ekonomi masuk dan keluar dari pusat Kota Yogyakarta mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pemanfaatan ruang desa-desa yang berada pada kawasan Kota Yogyakarta seperti daerah sub urban di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (BKTRN, 2008).

Luasan lahan yang dikonversi responden bermacam-macam, $< 500 \text{ m}^2$ (16,66% responden), $500-1000 \text{ m}^2$ (73,33% responden), dan $> 1000 \text{ m}^2$ (10% responden), hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang izin perubahan penggunaan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perorangan, dengan ukuran seluas-luasnya 5000 m^2 namun kebanyakan masyarakat lebih banyak melakukan izin perubahan lahannya seluas $500-1000 \text{ m}^2$ karena di saat melakukan perizinan selain untuk kebutuhan tempat tinggal

masyarakat juga menjadikan tempat tinggalnya menjadi tempat usaha. Sebanyak 85% responden menyatakan mengubah lahannya menjadi tempat tinggal, sedangkan 15% mengubah lahannya menjadi tempat usaha.

Pengetahuan responden mengenai dampak yang terjadi akibat konversi lahan sudah baik, akan tetapi masih ada 11,66% responden yang belum mengetahuinya. Responden yang telah mengetahui dampak yang terjadi akibat konversi lahan sebanyak 88,33%. Responden yang menyatakan menurunnya produksi pertanian sebagai dampak konversi lahan sebanyak 81,13% dan responden yang menyatakan bahwa menurunnya penyerapan air di suatu wilayah sebagai dampak konversi lahan yang terjadi terus-menerus sebanyak 16,98%. Responden yang menyatakan karena meningkatnya pencemaran lingkungan sebanyak 1,88% responden menyatakan apabila semakin banyak dan semakin padat masyarakat mengkonversi lahannya maka sampah dan limbah rumah tangga juga semakin banyak. Sebagai contoh pemukiman yang padat lebih sulit untuk mengatasi sampah karena keterbatasan lokasi untuk tempat sampah, dan adanya limbah industri juga sangat mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan.

Persepsi masyarakat yang menyatakan menurunnya produksi pertanian, disebabkan banyaknya industri dan bangunan di sekitar lahan pertanian serta penanganan limbah industri dan limbah rumah tangga yang kurang baik sehingga mencemari lingkungan di sekitar lokasi pertanian. Penanganan limbah dengan baik sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas produksi tanaman, penanganan limbah dapat dilakukan dengan cara membuat lokasi khusus untuk penanganan limbah cair dan padat sehingga hasil dari penanganan limbah tersebut

dapat di serap dengan baik oleh tanaman. Penurunan penyerapan air yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan karena adanya pengeringan lahan yang akan dikonversi menjadi bangunan sehingga akan berdampak kepada penyerapan air di sekitar wilayah tersebut.

Hasil kuisisioner, 100% responden mengetahui tentang alih fungsi lahan (Tabel 13). Pengetahuan ini didapatkan dari informasi-informasi yang disampaikan oleh kelompok tani dan pemerintah daerah setempat.

Tabel 13. Persepsi masyarakat yang tidak melakukan konversi lahan

No	Pertanyaan	Jawaban	Kab. Bantul	%
1	Apakah anda mengetahui tentang alih fungsi lahan sawah?	a. Ya b. Tidak	30 -	100,00 -
2	Apakah pernah melakukan alih fungsi lahan sawah?	a. Ya b. Tidak	30 -	100,00 -
3	Apakah penyebab utama anda tidak melakukan alih fungsi lahan sawah	a. ada peraturan daerah yang melarang mengubah alih fungsi lahan b. tidak ada keinginan untuk mengubah lahan c. sector pertanian dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	4 16 10	13,33 53,33 33,33
4	Apakah mengetahui tentang peraturan daerah yang melarang adanya perubahan alih fungsi lahan di daerah anda?	a. Ya b. Tidak	24 6	80,00 20,00
5	Darimanakah anda mengetahuinya?	a. pemerintah daerah b. penyuluh pertanian c. kelompok tani	- 9 15 24	- 30,00 50,00 80,00
6	Tahun berapa mengetahui peraturan tersebut	2002-2012	24	80,00
7	Menurut anda apakah peraturan tersebut telah berjalan dengan baik	a. Ya b. Tidak	- 27	- 90,00
8	Apakah anda mengetahui dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan sawah?	a. Ya b. Tidak	3 26	10,00 86,66
9	Apakah dampak akibat alih fungsi lahan sawah?	a. menurunnya produksi pertanian b. meningkatnya pencemaran lingkungan c. menurunnya penyerapan air	- 1 3	- 3,33 10,00
10	Apakah ada rencana untuk melakukan alih fungsi lahan sawah anda menjadi peternakan atau perikanan?	a. Ya b. Tidak	27 9	90,00 30,00
11	Apakah ada rencana untuk alih fungsi lahan sawah menjadi lahan terbangun?	a. Ya b. Tidak	21	70,00

Sebanyak 13,33% responden dari Kecamatan Dlingo mengatakan bahwa penyebab utama mereka tidak melakukan konversi lahan karena adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul yang menjadikan Kecamatan Dlingo salah satu "kawasan agrowisata" yang harus dijaga kelestarian lingkungannya. Perda tersebut ada dalam RTRW No 4 tahun 2011. Sedangkan 53,33% responden menyatakan penyebab tidak melakukan konversi lahan karena tidak ada keinginan untuk mengkonversi lahan, dan yang menyatakan sektor pertanian masih bisa diandalkan sebanyak 33,33% responden.

Sebanyak 80% responden dari Kecamatan Dlingo mengetahui adanya Peraturan Daerah yang menjadikan daerah mereka sebagai kawasan agrowisata, sedangkan yang tidak mengetahui menyatakan karena di daerahnya tidak ada Peraturan Daerah tersebut sebanyak 20% yang terdiri dari responden Kecamatan Banguntapan dan Sedayu. Menurut responden dari Kecamatan Dlingo, informasi tentang Peraturan Daerah tersebut diperoleh dari Penyuluh Pertanian sebanyak 30% responden, sedangkan 50% responden mengetahui Peraturan Daerah tersebut dari kelompok tani. Para responden mengetahui Peraturan Daerah RTRW Kabupten Bantul No 4 tahun 2011. Semua responden sangat menyetujui akan adanya perda dan dianggap telah berjalan dengan baik; hal ini terbukti karena lahan pertanian dan hutan di Kecamatan Dlingo masih terjaga, dan menjadi salah satu kecamatan yang menjadi agrowisata bagi Kabupaten Bantul.

Pentingnya mengetahui dampak yang terjadi akibat konversi lahan dapat mengarahkan pola pikir masyarakat agar lebih melihat jangka panjang ketika ingin melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, 90%

responden mengetahui dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan 10% responden belum mengetahuinya. Sebanyak 86,66% responden menyatakan dampak konversi lahan adalah menurunnya produksi pertanian, dan 3,33% responden menyatakan dampak konversi lahan adalah menurunnya kemampuan daerah untuk penyerapan air, responden mendapatkan pengetahuan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan akibat konversi lahan dari kegiatan penyuluhan pertanian dari kelompok tani.

Responden yang tidak melakukan konversi lahan ternyata juga memiliki rencana untuk mengkonversi lahan sawahnya menjadi peternakan atau perikanan dan rumah tinggal, sedangkan responden yang memiliki rencana mengkonversi lahannya menjadi perikanan sebanyak 10%, responden ini berasal dari Kecamatan Dlingo dan Sedayu, sedangkan 30% responden mengatakan memiliki rencana mengkonversi lahan sawahnya untuk tempat tinggal. Produktifitas sawah yang sudah mulai menurun menjadi alasan bagi responden yang ingin mengubah lahannya menjadi rumah tinggal dan perikanan.

Persepsi dari responden yang tidak melakukan konversi lahan pertanian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang konversi lahan. Sebagian responden yang tidak mengkonversi lahannya juga memiliki rencana untuk mengubah lahan sawahnya menjadi rumah tinggal atau peternakan. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di wilayah tersebut selalu menuntut akan kebutuhan rumah tinggal selain kebutuhan tempat tinggal didukung juga dengan keadaan lahan yang kurang produktif lagi akibat aktifitas konversi lahan.